



# Penerapan Prosedur Pemungutan Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Pengiriman Paket Pada PT Pos Cabang Sumbawa

Elisa

Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar

E-mail: [elisacha661@gmail.com](mailto:elisacha661@gmail.com)

Article Info	ABSTRACT
<b>Article history:</b>	
Received November 28, 2025	
Revised November 30, 2025	
Accepted Desember 01, 2025	
<b>Keywords:</b>	
Value-Added Tax (VAT), VAT Collection, VAT Recording, VAT Reporting, Package Delivery Services, PT POS Sumbawa Branch.	<i>This study aims to examine and analyze the application of Value-Added Tax (VAT) collection, recording, and reporting procedures for package delivery services at PT POS Sumbawa Branch. The study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews and documentation. The results show that PT POS Sumbawa Branch has implemented VAT collection, recording, and reporting procedures in accordance with applicable tax regulations. VAT collection is done correctly, VAT recording is done accurately, and VAT reporting is done on time. This study also finds that PT POS Sumbawa Branch has conducted internal supervision to ensure that VAT procedures are followed correctly. However, this study suggests that PT POS Sumbawa Branch needs to conduct regular employee training to ensure that employees understand the applicable VAT procedures.</i>
	<i>This is an open access article under the <a href="#">CC BY-SA</a> license.</i>

Article Info	ABSTRAK
<b>Article history:</b>	
Received November 28, 2025	
Revised November 30, 2025	
Accepted Desember 01, 2025	
<b>Kata Kunci:</b>	
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pemungutan PPN, Pencatatan PPN, Pelaporan PPN, Jasa Pengiriman Paket, PT POS Cabang Sumbawa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT POS Cabang Sumbawa telah menerapkan prosedur pemungutan, pencatatan, dan pelaporan PPN atas jasa pengiriman paket sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemungutan PPN dilakukan dengan benar, pencatatan PPN dilakukan secara akurat, dan pelaporan PPN dilakukan tepat waktu. Penelitian ini juga menemukan bahwa PT POS Cabang Sumbawa telah melakukan pengawasan internal untuk memastikan bahwa prosedur PPN diikuti dengan benar. Namun, penelitian ini juga menyarankan bahwa PT POS Cabang Sumbawa perlu melakukan pelatihan karyawan secara berkala untuk memastikan bahwa karyawan memahami prosedur PPN yang berlaku.
	<i>This is an open access article under the <a href="#">CC BY-SA</a> license.</i>

## Corresponding Author:

Elisa

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar

E-mail: [elisacha661@gmail.com](mailto:elisacha661@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Dengan adanya prinsip pajak pertambahan Nilai pada dasarnya sebagai pajak konsumsi dalam Daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengenaan pajak pertambahan



nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa, namun berdasarkan pertimbangan social, ekonomi dan budaya perlu untuk tidak mengenakan pajak pertambahan Nilai terhadap barang dan jasa tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan kestabilitasannya.

Berdasarkan pasal 9 angka 3 dan pasal 12 angka 3 PP No. 50 tahun 1994 dan PP No. 144 tahun 2000 tentang barang dan jasa yang terutang PPN, menyatakan bahwa salah satu jasa yang terutang PPN adalah jasa pengiriman paket, sebesar 11% dari jumlah tagihan atau dari jumlah seharusnya ditagih. Namun tidak demikian yang tercantum di dalam resi tanda terima pengiriman paket melalui PT. Pos Indonesia, yang hanya mencantumkan sejumlah beban uang yang harus dibayar oleh pengirim paket, tanpa mencantumkan tambahan PPN nya. Penulis mengambil data PPN pada PT. Pos Indonesia karena perusahaan Wajib pajak sudah memenuhi Subjek dan Objek pajak pertambahan Nilai yang sudah berada cukup lama beroperasi di Indonesia dengan kegiatannya jasa pengiriman paket. Selain itu penulis memilih perusahaan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prosedur, pemungutan pelaporan pajak agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang No.42 Tahun 2009 tentang PPN.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada PT. POS Indonesia Cabang Sumbawa yang berlokasi di Jl. Garuda No.99, Lempeh, Kec. Sumbawa. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang sumber datanya di ambil dari PT. POS Indonesia Cabang Sumbawa dengan menggunakan metode pengumpulan data dan wawancara, Dokumentasi dan Observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Dasar Atas Penerapan Prosedur Pemungutan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket Pada PT POS Cabang Sumbawa

Undang-undang perpajakan Republik Indonesia No.8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang No.7 tahun 2021 objek pajak yang diatur dalam pasal 4 undang-undang No.42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang, jasa dan pajak atas penjualan barang mewah, menyatakan bahwa salah satu jasa yang terutang PPN adalah jasa pengiriman paket, yaitu 11% (sebelas persen) dari jumlah tagihan atau dari jumlah yang seharusnya ditagih dan nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke kas Negara. Dengan adanya prinsip pajak pertambahan Nilai pada dasarnya sebagai pajak konsumsi dalam Daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengenaan pajak pertambahan nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa, namun berdasarkan pertimbangan social, ekonomi dan budaya perlu untuk tidak mengenakan pajak pertambahan Nilai terhadap barang dan jasa tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan kestabilitasannya.



## 2. Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket Pada PT POS Cabang Sumbawa

Berdasarkan hasil wawancara diatas terhadap pemungutan PPN di PT POS Cabang Sumbawa.Pembuatan Faktur Pajak: PT Pos Cabang Sumbawa membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang dan jasa yang dikenai PPN. Faktur pajak ini merupakan bukti pungutan pajak yang sah dan harus diterbitkan oleh pengusaha kena pajak (PKP) seperti PT Pos Cabang Sumbawa. Pelaporan PPN: PT Pos Cabang Sumbawa juga melaporkan PPN yang dipungut dan dibayar kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPN.

SPT Masa PPN ini digunakan untuk melaporkan kegiatan pemungutan dan pembayaran PPN dalam suatu masa pajak tertentu. Dengan demikian, PT Pos Cabang Sumbawa telah menjalankan prosedur pemungutan dan pelaporan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut telah patuh terhadap kewajiban perpajakan terkait PPN.

Sebagaimana yang dijelaskan Kembali oleh bapak Rudi selaku bagian dari keuangan di PT POS Cabang Sumbawa Sebagai berikut:

“Jenis layanan yang dikenai PPN di PT Pos Cabang Sumbawa antara lain pengiriman paket, wesel pos, dan jasa lainnya yang dikenai PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, kami memastikan kepatuhan terhadap peraturan PPN dengan melakukan pelatihan kepada karyawan, memantau perubahan peraturan perpajakan, dan melakukan audit internal untuk memastikan bahwa proses pemungutan PPN telah dilakukan dengan benar.”

## 3. Prosedur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket Pada PT POS Cabang Sumbawa

Berikut adalah langkah-langkah pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT POS Cabang Sumbawa:

1. Menghitung PPN Keluaran: PT POS Cabang Sumbawa menghitung PPN Keluaran atas jasa pengiriman paket yang dipungut dari pelanggan. PPN Keluaran ini dihitung berdasarkan tarif PPN yang berlaku dan nilai penyerahan jasa pengiriman paket.
2. Menghitung PPN Masukan: PT POS Cabang Sumbawa juga menghitung PPN Masukan atas perolehan barang dan jasa yang digunakan dalam kegiatan usaha pengiriman paket. PPN Masukan ini dapat dikurangkan dari PPN Keluaran untuk menentukan PPN terutang.
3. Membuat SPT Masa PPN: PT POS Cabang Sumbawa membuat Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPN pada akhir masa pajak. Dalam SPT Masa PPN, PT POS Cabang Sumbawa melaporkan PPN Keluaran, PPN Masukan, dan PPN terutang.
4. Menghitung PPN Terutang: PT POS Cabang Sumbawa menghitung PPN terutang dengan mengurangkan PPN Masukan dari PPN Keluaran. Jika PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan, maka PT POS Cabang Sumbawa memiliki PPN kurang bayar yang harus dibayar ke kas negara.
5. Membayar PPN Terutang: PT POS Cabang Sumbawa membayar PPN terutang sesuai dengan perhitungan dalam SPT Masa PPN. Pembayaran PPN terutang dilakukan melalui bank atau kantor pos yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.



6. Mengarsipkan Dokumen: PT POS Cabang Sumbawa mengarsipkan semua dokumen yang terkait dengan pelaporan PPN, termasuk SPT Masa PPN, faktur pajak, dan bukti pembayaran PPN. Dokumen-dokumen ini harus disimpan dengan baik dan dapat diakses jika diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Penerapan Prosedur Pemungutan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Pengiriman Paket Pada PT POS Cabang Sumbawa disimpulkan sebagai Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada PT POS Cabang Sumbawa telah memenuhi kewajiban perpajakan dengan memungut, mencatat, dan melaporkan PPN atas jasa pengiriman paket. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Transparansi dan Akurasi Penerapan prosedur PPN yang tepat memastikan transparansi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan Perusahaan.

Penghindaran Sanksi Dengan melakukan pemungutan, pencatatan, dan pelaporan PPN yang benar, PT POS Cabang Sumbawa dapat menghindari sanksi perpajakan yang tidak perlu. Peningkatan Kepercayaan Penerapan prosedur PPN yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan stakeholders terhadap PT POS Cabang Sumbawa.

Dengan demikian, penerapan prosedur pemungutan, pencatatan, dan pelaporan PPN atas jasa pengiriman paket pada PT POS Cabang Sumbawa telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

## SARAN

Pengembangan Sistem Akuntansi PT POS cabang Sumbawa perlu mengembangkan sistem akuntansi yang lebih baik untuk memudahkan dalam pencatatan dan pelaporan PPN. Pelatihan dan Pengembangan PT POS cabang Sumbawa perlu melakukan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai yang terkait dengan prosedur PPN untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka. Pengawasan dan Evaluasi PT POS cabang Sumbawa perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap prosedur PPN untuk memastikan bahwa prosedur tersebut telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku No.7 Tahun 2021 dengan demikian, PT POS cabang Sumbawa dapat meningkatkan kualitas penerapan prosedur PPN dan meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan dalam penerapan prosedur PPN dan meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim,2024. Tata cara penulisan proposal dan skripsi STIE INDONESIA MAKASSAR.  
Chikah Arfah, MI, Anzhari, AM, Amir, IR, Winarti, Jumriani, & Eka Putra, MW (2025).  
Evaluasi Penerapan E-Spt Dalam Pelaporan Pajak Pada Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Ilmiah Neraca : Ekonomi Bisnis, Manajemen, Akuntansi , 8 (1), 90-94.



- Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Nenggapratama Internusantara. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 13(02), 78–87. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19087.2018>
- Halim.abdul.Dll.2020.Perpjakan konsep,aplikasi,contoh, dan studi kasus edisi 3. Jakarta:selemba empat
- Kuncoro,185:2009 Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diaca dan interpretasikan.
- Latihifa.Dina.2022. Perpjakan Indonesia, Pengertian, Fungsi dan sistem pemungutan.<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/perpjakan-di-indonesia-pengertian-fungsi-dan-sistem-pemungutan-yang-berlaku>
- Muljono, Djoko. 2006. Akuntansi Pajak, Edisi kedua, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Pradana, R. Z. (2022). Problematika Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Dengan Pemberlakuan Kenaikan Tarif Ppn. Japhtn-Han, 1(2). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.33>
- Purwanto, E., & Handoko, S. (2022). Pumpunan kajian urban.
- Puspasari, R. (n.d.). Siaran Pers APBN 2023: Pemerintah Berkomitmen untuk Meningkatkan Produktivitas Dalam Rangka Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Siaran-Pers-APBN-2023>
- Rizkianti, R. R., & Fatimah, H. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Penjualan Pada PT. XYZ Cabang Tangerang. Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen, 2(2), 91–107.
- Siswati Rachman.2020.Prosedur pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas dasar pengiriman paket pada PT POS Indonesia
- Sudrajat,2013:25. Penelitian kuantitatif dilihat dari segi tujuan,penelitian ini dipakai untuk menguji suatu teori,menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan banyak hal.
- Sudrajat,2017:25. Penelitian kuantitatif dilihat dari segi tujuan,penelitian ini dipakai untuk menguji suatu teori,menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan banyak hal.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-16/PJ/2016 tentang presentase pajak.
- Syarifudin, A. (2018). Buku Ajar Perpjakan. STIE Putra Bangsa, 4(1), 1–251.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpjakan.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Untung Sukardji,301;2015 Tata Cara Pelaporan.
- Waluo,11;2018 PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam Negeri,penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dilakukan atas konsumsi dalam Negeri .
- Waluo,13;2017. Terdapat empat asas pemungutan pajak.
- Waluyo (332:2012) dalam buku Akutansi Pajak
- Walyuo,332:2018. pajak dibayar dimuka.
- Widianto, Joko.2012. SPSS For Windows, Surakarta: badan Penerbit-FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta.